



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

bangga
melayani
bangsa



KEMENKUM KALSEL NEWS

BULETIN

MINGGU KE- **4** APRIL 2025



SELEKSI PPPK TAHAP II



PENDAMPINGAN
PENGISIAN PMPJ



HARI KEKAYAAN
INTELEKTUAL

KANWIL KEMENKUM KALIMANTAN SELATAN

- DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- DIVISI PELAYANAN HUKUM
- BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Kanwil Kemenkum Kalsel Peringati Hari Kartini: Teguhkan Komitmen Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan apel pagi sekaligus memperingati Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, 21 April 2025. Kegiatan ini berlangsung khidmat di halaman kantor wilayah dan diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan tinggi pratama, pejabat manajerial, pejabat non manajerial, serta seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Apel dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, yang dalam amanatnya membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi, dalam rangka Peringatan Hari Kartini Tahun 2025.

Dalam amanat tersebut, Menteri PPPA mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menghidupi semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini, yang telah menyuarakan ketidakadilan terhadap perempuan dan bangsanya sejak usia muda.

“Kartini adalah simbol keberanian untuk berpikir melampaui zamannya. Ia membayangkan Indonesia yang lebih adil, di mana perempuan bebas bermimpi, menempuh pendidikan, dan menentukan nasibnya sendiri,” bunyi amanat tersebut.

Kepala Kantor Wilayah menegaskan kembali bahwa semangat Kartini tidak boleh padam dan harus terus dihidupi dalam setiap langkah kehidupan perempuan Indonesia—baik sebagai pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, pemimpin, guru, inovator, hingga aktivis yang terus memperjuangkan kesetaraan dan pemberdayaan.

“Peringatan Hari Kartini ini bukan sekadar seremoni, melainkan panggilan untuk bertindak. Kita semua memiliki peran dalam membuka ruang partisipasi, menolak diskriminasi, dan memastikan setiap perempuan bisa tumbuh dan berdaya dari mana pun ia berasal,” ujar Nuryanti.

Di akhir apel, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai perempuan yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak sebagai bagian dari pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Apel pagi ini menjadi momen reflektif dan inspiratif yang mengingatkan kembali pentingnya peran perempuan dalam sejarah, masa kini, dan masa depan bangsa.

Pada kesempatan ini Kakanwil juga turut melakukan pemeriksaan Kedisiplinan atribut seragam yang digunakan oleh pegawai untuk memastikan Kedisiplinan jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Kalsel terus terjaga.

Ikuti Rapat Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II, Kanwil Kemenkum Kalsel Mantapkan Persiapan



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Persiapan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024 secara virtual pada Senin (21/4). Rapat ini diikuti dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, serta Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDM, Eko Herdianto serta anggota Tim Kerja Pengelolaan SDM

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Fajar Sulaeman Taman, bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan 135 formasi yang tersedia, Seleksi Tahap II PPPK ini telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi.

Dalam arahnya, Fajar Sulaeman Taman menekankan pentingnya koordinasi antara panitia pusat dan panitia daerah, yang terdiri dari Kantor Wilayah dan BKN, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan seleksi. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat menjaga integritas dan profesionalisme selama proses seleksi, termasuk dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada peserta berkebutuhan khusus dan/atau wanita hamil.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti menyampaikan komitmennya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi ini.

"Kami siap melaksanakan seleksi ini dengan integritas dan profesionalisme tinggi, serta menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kegiatan," ujar Nuryanti Widyastuti.

Untuk wilayah Kalimantan Selatan, Seleksi Kompetensi PPPK dijadwalkan berlangsung pada 22 April 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang.

Wujud Keadilan bagi Masyarakat, Kemenkum Hadirkan 1.764 Posbankum se-Indonesia



Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) memandang perlunya pemerataan akses terhadap bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, agar terwujud keadilan bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, Kemenkum menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dalam tingkat desa dan kelurahan se-Indonesia.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa hingga berakhirnya triwulan I 2025, telah terbentuk 1.764 Posbankum di desa dan kelurahan. Posbankum akan memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, mediasi, serta rujukan ke Pemberi Bantuan Hukum/Advokat Probono yang dibutuhkan oleh masyarakat baik di desa maupun kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Ada masyarakat yang belum memahami persoalan hukum yang dihadapi. Sehingga kami hadirkan Posbankum untuk memberikan informasi dan konsultasi, hingga rujukan ke pemberi bantuan hukum gratis,” kata Supratman di kantor Kemenkum, Selasa (15/04/2025).

Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini mengatakan Kemenkum menargetkan terbentuknya 7.000 Posbankum hingga akhir tahun 2025. Para pelaksana Posbankum terdiri atas paralegal desa dari kelompok keluarga sadar hukum, serta para kepala desa/lurah sebagai juru damai.

Untuk mendukung pencapaian target Posbankum, Kemenkum menyelenggarakan pelatihan paralegal. Dalam angkatan pertama, pelatihan ini diikuti oleh 2.962 orang, 257 organisasi pemberi bantuan hukum, dan 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

“Pelatihan paralegal adalah program pelatihan untuk memperoleh keterampilan hukum dan pengetahuan dasar bantuan hukum. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum,” jelasnya.

Lulusan doktor dari Universitas Muslim Indonesia ini menyampaikan bahwa Posbankum dapat merujuk masyarakat yang tengah menghadapi persoalan hukum ke organisasi pemberi bantuan hukum. Dalam periode 2025-2027, Kemenkum telah bermitra bersama 777 pemberi bantuan hukum gratis dengan target pemberian bantuan hukum di tahun 2025 sebanyak 6.263 bantuan litigasi dan 839 bantuan non litigasi.

Selain itu, di tahun 2025 Kemenkum akan memberikan penghargaan Peacemaker Justice Award bagi kepala desa atau lurah yang menyelesaikan masalah hukum di tingkat desa atau kelurahan. Sampai dengan Maret 2025, sebanyak 2.157 Kepala Desa/Lurah telah mendaftar sebagai peserta Peacemaker Justice Award. Mereka akan diseleksi pada bulan April 2025, untuk kemudian mengikuti pelatihan pada bulan Mei 2025.

“Kami mendorong sebanyak-banyaknya kepala desa dan lurah untuk menjadi juru damai, menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi warganya,” tambahnya.

Kemenkum juga terus berupaya meningkatkan literasi hukum melalui program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Selama triwulan I 2025 Kemenkum mencatat sebanyak 658.361 dokumen telah terintegrasi pada jdihn.go.id dengan jumlah anggota 1.679 orang. Website JDIH sebanyak 1.246 telah dibangun oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang 1.234 di antaranya telah terintegrasi kepada JDIH nasional.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian Hukum dalam menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan sebagai langkah konkret mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. “Hadirnya 1.764 Posbankum di seluruh Indonesia hingga triwulan I tahun 2025 merupakan bukti nyata komitmen Kemenkum dalam memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, mendapatkan akses informasi dan bantuan hukum yang layak dan tanpa biaya,” ujarnya.

Nuryanti menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel siap mendukung penuh target nasional pembentukan 7.000 Posbankum melalui sinergi dengan pemerintah daerah, pemberi bantuan hukum, serta pemberdayaan paralegal desa dan lurah sebagai juru damai. Ia juga menyambut baik program Peacemaker Justice Award sebagai bentuk penghargaan bagi kepala desa/lurah yang aktif menyelesaikan konflik di masyarakat. “Inisiatif ini sangat sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan budaya hukum lokal yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai dan partisipatif,” pungkasnya.



BSK Hukum Publikasikan 9 Artikel Ilmiah di Triwulan I 2025



Jakarta - Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) pada triwulan pertama tahun ini telah mencatatkan pencapaian dengan mempublikasikan sembilan artikel pada jurnal ilmiah. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menilai BSK Hukum berkomitmen dalam mendukung kebijakan berbasis bukti di bidang hukum.

BSK Hukum, yang menyediakan layanan jurnal elektronik (e-Journal) dalam platform digital, memberikan informasi atas berbagai karya tulisan ilmiah yang merupakan hasil kajian/analisis kebijakan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Publikasi jurnal ilmiah ini berperan penting dalam menyebarkan pemikiran, serta analisis kebijakan bidang hukum, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kebijakan di Indonesia," kata Supratman dalam sesi Konferensi Pers Capaian Kinerja Triwulan I dan Update Isu Aktual Kemenkum Tahun 2025, Selasa (15/04/2025) siang.

Saat ini BSK Hukum memiliki tiga jurnal yang terakreditasi SINTA 2, yaitu Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Jurnal HAM, dan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak secara gratis. Hingga Maret 2025, telah dipublikasikan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Edisi Maret 2025 sebanyak 5 tulisan dan JIKH Edisi Maret 2025 sejumlah 4 tulisan.

Secara total di capaian periode triwulan I ini, sebanyak 109 tulisan telah disampaikan (submissions) SINTA 2. Terinci 49 jurnal di antaranya berbentuk tulisan Jurnal Hukum de Jure, 18 Jurnal HAM, dan 42 JIKH.

"Setiap tulisan dalam jurnal ini disusun dengan pendekatan yang cermat dan sistematis yang dilakukan oleh para analis kebijakan, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada publik tentang isu-isu yang tengah berkembang," ucap Supratman.

"Selain itu, melalui jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para stakeholder, baik di sektor pemerintahan, akademik, maupun swasta, dalam membuat dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, guna memberikan solusi atas tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang ada," kata pria yang akrab disapa Bang Maman ini.

Selain itu, BSK Hukum juga memiliki peran yang sangat strategis sebagai unit pendukung dalam perumusan kebijakan di bidang hukum. Dari total 34 isu kebijakan yang dikaji dengan melaksanakan analisis strategi kebijakan dalam periode triwulan pertama di 2025, 13 di antaranya telah selesai (38,24 persen), dan 21 lainnya masih dalam proses.



“Hasil analisis yang dilakukan oleh BSK Hukum menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, salah satunya berupa Peraturan Menteri Hukum (Permenkum),” kata Supratman.

Adapun kajian/analisis kebijakan terdiri dari kajian/analisis terhadap Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Menteri dan kajian/analisis isu aktual berdasarkan permintaan atau isu. Dari 13 judul yang telah selesai dikaji, beberapa tajuknya membahas tentang pengintegrasian layanan publik Kemenkum menuju transformasi digital, serta analisis kebijakan tentang kerja sama bidang hukum dengan berbagai negara seperti Belanda, Swiss, dan Inggris.

“Output kajian/analisis kebijakan berupa naskah kebijakan, risalah kebijakan, dan policy paper yang kemudian disampaikan kepada para pemangku kepentingan,” ujar Supratman di Ruang Rapat Soepomo, gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum.

Selain memproduksi kajian/analisis strategi kebijakan dan jurnal elektronik (e-Journal), BSK Hukum juga melakukan pengukuran/indeks diantaranya Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Indeks Kualitas Kebijakan Kemenkum serta Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi. Layanan lain yang diberikan oleh BSK Hukum yaitu menyediakan layanan narasumber, konsultasi dan audiensi, serta buku elektronik (e-Book).

“BSK Hukum telah menetapkan lima layanan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik,” kata Supratman.

“BSK Hukum menyediakan layanan narasumber, konsultasi dan audiensi, baik atas permintaan dari internal Kemenkum, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah terkait kebutuhan kepakaran di bidang hukum atau pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Hukum,” tambahnya.

Hasil kajian/analisis kebijakan BSK Hukum dipublikasikan melalui buku, baik dalam versi cetak maupun elektronik. Untuk memudahkan masyarakat mengaksesnya, buku-buku hasil kajian secara elektronik dipublikasikan melalui aplikasi e-Book di Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) memandang perlunya pemerataan akses terhadap bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, agar terwujud keadilan bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, Kemenkum menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dalam tingkat desa dan kelurahan se-Indonesia.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa hingga berakhirnya triwulan I 2025, telah terbentuk 1.764 Posbankum di desa dan kelurahan. Posbankum akan memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, mediasi, serta rujukan ke Pemberi Bantuan Hukum/Advokat Probono yang dibutuhkan oleh masyarakat baik di desa maupun kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Ada masyarakat yang belum memahami persoalan hukum yang dihadapi. Sehingga kami hadirkan Posbankum untuk memberikan informasi dan konsultasi, hingga rujukan ke pemberi bantuan hukum gratis,” kata Supratman di kantor Kemenkum, Selasa (15/04/2025).

Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini mengatakan Kemenkum menargetkan terbentuknya 7.000 Posbankum hingga akhir tahun 2025. Para pelaksana Posbankum terdiri atas paralegal desa dari kelompok keluarga sadar hukum, serta para kepala desa/lurah sebagai juru damai.

Untuk mendukung pencapaian target Posbankum, Kemenkum menyelenggarakan pelatihan paralegal. Dalam angkatan pertama, pelatihan ini diikuti oleh 2.962 orang, 257 organisasi pemberi bantuan hukum, dan 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

“Pelatihan paralegal adalah program pelatihan untuk memperoleh keterampilan hukum dan pengetahuan dasar bantuan hukum. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum,” jelasnya.

Lulusan doktor dari Universitas Muslim Indonesia ini menyampaikan bahwa Posbankum dapat merujuk masyarakat yang tengah menghadapi persoalan hukum ke organisasi pemberi bantuan hukum. Dalam periode 2025-2027, Kemenkum telah bermitra bersama 777 pemberi bantuan hukum gratis dengan target pemberian bantuan hukum di tahun 2025 sebanyak 6.263 bantuan litigasi dan 839 bantuan non litigasi.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh BSK Hukum pada triwulan I, indeks survei persepsi anti korupsi (SPAK) Kemenkum berada di level sangat baik dengan nilai 97,78 dari maksimal 100. Sementara itu, indeks survei persepsi kepuasan layanan publik (SPKP) juga di level sangat baik dengan nilai 97,27 dari maksimal 100.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan dukungan atas capaian Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum yang telah memublikasikan sembilan artikel ilmiah pada jurnal bereputasi di triwulan I tahun 2025. Menurutnya, langkah BSK Hukum ini merupakan wujud nyata dari penguatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang sangat penting dalam menjawab tantangan hukum dan sosial yang terus berkembang. “Publikasi ilmiah yang dilakukan BSK Hukum bukan hanya memperkuat literasi dan pemikiran strategis di bidang hukum, tetapi juga menyediakan referensi yang kredibel bagi pemangku kebijakan di pusat maupun daerah, termasuk kami di wilayah,” ujar Nuryanti.

Ia juga menyambut baik layanan digital seperti e-Journal dan e-Book yang memudahkan akses informasi bagi masyarakat dan stakeholder, serta menilai tingginya nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Kepuasan Layanan Publik sebagai bukti kredibilitas dan akuntabilitas yang patut dijadikan teladan. “Kami di Kanwil Kemenkum Kalsel siap mendukung dan memanfaatkan hasil kajian BSK Hukum dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik,” pungkasnya.



Siapkan Tenaga Hukum Berkualitas, Poltekipin Kembangkan Program Studi Baru



Jakarta - Tantangan yang semakin kompleks dan dinamis dalam sektor hukum mendesak adanya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, kompeten, profesional, dan inovatif. Kementerian Hukum (Kemenkum) merespon cepat hal tersebut dengan membuka program studi (prodi) baru di kampus Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekipin) Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Hukum.

“Kebutuhan akan sumber daya yang profesional, inovatif, terampil diperlukan oleh Kementerian Hukum, terutama dalam rangka peningkatan layanan hukum di Indonesia yang dinamis dan lebih merata,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, saat memberikan pernyataan dalam sesi konferensi pers tentang Capaian Kinerja Triwulan I Kemenkum, Selasa (15/04/2025) siang.

Program studi baru yang dikembangkan yakni Pembangunan Hukum, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Kekayaan Intelektual, dan Administrasi Hukum Umum.

“Pengembangan empat prodi baru disesuaikan dengan bidang-bidang tugas yang diselenggarakan oleh Kemenkum,” ucap Supratman di Ruang Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum.

Rasionalitas pentingnya pembukaan program studi baru, lanjut Supratman, berdasarkan analisis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kemenkum dalam melaksanakan program prioritas Kabinet Merah Putih 2024-2029, antara lain kualitas SDM yang terampil dan kompeten. Oleh sebab itu, diperlukan ketersediaan SDM yang mencukupi dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Melalui pendidikan yang relevan, diharapkan Poltekipin dapat berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan adil.

“Diharapkan ke depan, Poltekipin dapat berkontribusi dalam mencetak generasi penerus, SDM yang memiliki keahlian dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugas pengayoman dan penegakan hukum,” kata Supratman.

Di samping itu, BPSDM Hukum pada periode Januari-Maret 2025 telah menyelenggarakan pelatihan bagi 17.212 peserta. Terdiri dari 12.052 peserta internal dan 5.160 peserta eksternal, pelatihan ini menggunakan enam metode pembelajaran yakni webinar, klasikal, Community of Practice (CoP), Massive Open Online Courses (MOOC), pembelajaran jarak jauh, serta hybrid.

Selain itu, dalam mendukung transformasi digital, BPSDM Hukum telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi MOOC, Aplikasi Tes Potensi, Aplikasi Aparat, dan CoP. Melalui aplikasi ini, BPSDM Hukum melakukan integrasi dengan aplikasi pengembangan kompetensi, untuk melakukan pemetaan terhadap adanya bugs dan resiko keamanan sebagai upaya pengetatan keamanan pada kinerja sistem informasi.

“Selain itu, BPSDM juga berkoordinasi dengan Pusdatin dan BSSN terkait serangan siber yang terjadi, sedangkan Cop merupakan aplikasi pengembangan kompetensi berbasis komunitas, dimana pengembangan aplikasi ini memasuki tahap pengujian oleh user dan pengajuan domain ke Pusdatin,” jelas Supratman.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik dan mendukung langkah strategis Kemenkum melalui BPSDM Hukum dalam mengembangkan program studi baru di Politeknik Pengayoman Indonesia (Polteknip). Menurutnya, pembukaan prodi Pembangunan Hukum, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Kekayaan Intelektual, dan Administrasi Hukum Umum merupakan jawaban tepat atas kebutuhan mendesak terhadap sumber daya manusia hukum yang tidak hanya profesional dan kompeten, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Pengembangan prodi ini akan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan kader-kader hukum yang unggul, yang kelak mendukung peningkatan kualitas layanan hukum secara menyeluruh, termasuk di daerah,” ujar Nuryanti. Ia juga mengapresiasi penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan integratif oleh BPSDM Hukum, termasuk pemanfaatan teknologi digital seperti MOOC dan aplikasi CoP dalam pengembangan kompetensi. “Transformasi digital dalam pengembangan SDM harus terus diperkuat demi mendukung birokrasi yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.



© Copyright | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan

Kemenkum Kalsel Perkuat Kompetensi Layanan Paten Melalui Webinar Teknis Perbaikan Sertifikat

Banjarmasin, KI_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), kembali mengikuti rangkaian webinar series OKE KI #12 yang mengusung tema “Teknis Pengajuan Perbaikan Sertifikat Paten” pada Senin, (21/04/2025).

Kegiatan ini digelar secara virtual dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi, beserta tim teknis layanan KI setempat. Narasumber utama dalam acara ini adalah Hermawan Saputri, Sekretaris Tim Kerja Sertifikasi Paten, yang memaparkan langkah-langkah strategis dalam proses perbaikan sertifikat paten.

Hermawan Saputri menjelaskan bahwa perbaikan sertifikat paten merupakan prosedur penting untuk memastikan keakuratan data dalam dokumen resmi pemegang paten. Kesalahan administratif atau teknis dalam sertifikat, seperti nama inventor, alamat pemegang hak, atau detail temuan, harus segera diperbaiki untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari. “Proses perbaikan ini diatur dalam Undang-Undang Paten dan wajib diajukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan agar memiliki kekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Dalam paparannya, Hermawan merinci tahapan pengajuan perbaikan sertifikat paten, meliputi:

1. Verifikasi Kesalahan: Pemegang paten atau kuasa hukum wajib memastikan jenis kesalahan pada sertifikat, baik administratif maupun substantif.
2. Pengumpulan Dokumen: Melampirkan bukti pendukung seperti surat pernyataan kesalahan, fotokopi sertifikat asli, serta dokumen identitas pemohon.
3. Pengajuan Permohonan: Proses dilakukan melalui sistem elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau secara langsung ke kantor KI terdekat.
4. Pemeriksaan oleh Tim Ahli: Tim sertifikasi paten akan mengevaluasi permohonan dan memutuskan kelayakan perbaikan dalam waktu 14 hari kerja.

Hermawan juga menekankan pentingnya memanfaatkan layanan online seperti Sistem Aplikasi Elektronik Permohonan KI untuk mempercepat proses. “Penggunaan Sistem meminimalisir kesalahan pengisian data dan memudahkan pemantauan status permohonan,” tambahnya. Selain itu, ia mengingatkan agar pemohon memahami batas waktu pengajuan perbaikan, yaitu maksimal 3 bulan setelah sertifikat diterima, kecuali untuk kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian petugas.



© Copyright | Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan

Implementasi KUHP Baru Dimulai : Pancasila Jadi Jiwa Pelatihan di BPSDM Hukum



Dalam rangkaian kegiatan Training of Facilitator (TOF) Implementasi KUHP Angkatan I Tahun 2025, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum), Gusti Ayu Putu Suwardani, memberikan materi khusus tentang Implementasi Nilai-Nilai Pancasila kepada para peserta pelatihan.

Dalam penyampaian materinya, Gusti Ayu menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga memiliki makna yang jauh lebih mendalam sebagai pedoman hidup, identitas bangsa, dan tujuan bernegara. "Pancasila harus menjadi napas dalam setiap langkah pengabdian kita, baik sebagai aparatur negara maupun sebagai warga bangsa. Ia bukan hanya dokumen konstitusional, melainkan nilai yang harus dihidupi dalam keseharian," tegasnya di hadapan para peserta yang berasal dari unsur pejabat fungsional bidang hukum dan aparat penegak hukum.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa ke depan, kurikulum pelatihan di BPSDM akan secara sistematis memasukkan materi implementasi nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya dalam pelatihan untuk aparatur, nilai-nilai tersebut juga akan diinternalisasikan dalam pendidikan taruna di Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN). "Generasi muda calon pemimpin hukum ke depan harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila sejak awal, agar mampu menjadi penjaga moral dan etika di tengah perubahan zaman," ujar Gusti Ayu.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi BPSDM Hukum dalam memperkuat integritas dan karakter kebangsaan sumber daya manusia hukum, sekaligus mendukung implementasi KUHP baru secara lebih utuh dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Melalui penanaman nilai Pancasila secara konsisten dan terstruktur dalam pelatihan dan pendidikan, BPSDM Hukum berharap dapat membentuk insan hukum yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga tangguh secara moral dan ideologis dalam mewujudkan Indonesia yang adil, bermartabat, dan berkeadaban.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan Training of Facilitator (TOF) Implementasi KUHP Tahun 2025 yang menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa dalam pelatihan di BPSDM Hukum. "Langkah yang dilakukan oleh BPSDM Hukum ini merupakan bentuk nyata dari upaya penguatan karakter dan integritas aparatur hukum yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Penanaman nilai Pancasila secara sistematis, baik dalam pelatihan aparatur maupun pendidikan taruna, adalah fondasi penting dalam menyukseskan implementasi KUHP baru yang humanis dan berkeadilan," ujar Nuryanti.

Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan moralitas dan etika berbasis Pancasila sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. "Kami di Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan tentu mendukung penuh inisiatif ini dan siap berkontribusi dalam menyebarluaskan semangat Pancasila sebagai ruh dari setiap kebijakan dan langkah penegakan hukum di daerah," pungkasnya.

Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar kegiatan rapat harmonisasi bersama Pemerintah Kota Banjarmasin dan Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik (Perumda PALD) Kota Banjarmasin dalam rangka melakukan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD).

Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (22/4/25) bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, bersama para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dari lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, antara lain perwakilan dari Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin. Kegiatan ini juga turut dihadiri langsung oleh Direktur Perumda PALD Kota Banjarmasin, Endang Waryono.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan amanat undang-undang yang sangat penting untuk memastikan agar produk hukum daerah yang dihasilkan tidak saling bertentangan dan memiliki kepastian hukum.

Sementara itu, Direktur Perumda PALD Kota Banjarmasin, Endang Waryono, menjelaskan bahwa air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dan langsung dibuang ke lingkungan dapat menyebabkan pencemaran yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan air limbah domestik yang komprehensif dan terpadu.

Lebih lanjut, Endang menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, melindungi kualitas air baku dari pencemaran, serta mendorong pemanfaatan hasil pengolahan air limbah secara bijak dan berkelanjutan.

Kegiatan berlangsung lancar dengan pembahasan mendetail terhadap pasal demi pasal dalam rancangan peraturan, guna menyempurnakan substansi serta memberikan masukan demi terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas dan aplikatif.

Gelar TOF Implementasi KUHP Angkatan I Tahun 2025: Perkuat SDM Hukum untuk Indonesia yang Taat dan Sadar Hukum



Depok, BSDM_Info – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, membuka secara resmi Training of Facilitator (TOF) Implementasi KUHP Angkatan I Tahun 2025 di Gedung Guest House BPSDM Hukum, Senin (21/04). Dirinya menjelaskan sebanyak 30 peserta yang terdiri dari Pejabat Fungsional Rumpun Hukum dan Peradilan serta Aparat Penegak Hukum mengikuti pelatihan ini. "Mereka dipersiapkan sebagai fasilitator yang akan menjadi ujung tombak dalam menyebarkan pemahaman serta implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 2026," jelas Kepala BPSDM Hukum.

Sebelumnya Kepala Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida melaporkan kegiatan ini dilaksanakan dalam format blended learning dan klasikal. "Pelatihan blended learning ini memiliki total 76 Jam Pelajaran, yang mencakup diskusi kelas, diskusi kelompok, dan penyampaian materi substantif dari para pengajar yang berkompeten," ujar Mutia.

Sekretaris Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Masyarakat R. Andika Dwi Prasetya dalam sambutannya menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif BPSDM Hukum. "Kementerian Koordinator mendukung sepenuhnya segala kegiatan yang menjadikan KUHP baru ini siap diimplementasikan tahun 2026. Para peserta pelatihan ini menjadi corong dalam penyebaran informasi dan edukasi ke masyarakat melalui peran dan bidang kerja masing-masing," ungkap R. Andika.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum juga menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya poin nomor 4 tentang Penguatan SDM dan poin nomor 7 tentang Reformasi Hukum, tetapi juga menyentuh aspek fundamental kebangsaan. "BPSDM Hukum juga berkomitmen menguatkan nilai-nilai ideologi Pancasila seperti tercantum dalam Asta Cita nomor 1. Oleh karena itu, kami akan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pembelajaran ke depan," ujar Gusti Ayu.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, serta perwakilan narasumber, pakar hukum pidana nasional, Dr. Yenti Garnasih. Melalui pelatihan ini, Gusti Ayu berharap para fasilitator dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya memahami KUHP baru secara substansi, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat dan sadar hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, yang turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan TOF Implementasi KUHP sebagai bentuk konkret penguatan kapasitas SDM hukum di daerah. "Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa transformasi hukum melalui KUHP baru tidak hanya dipahami di tingkat pusat, tetapi juga diimplementasikan secara merata hingga ke pelosok daerah. Kami di wilayah siap mendukung dan mengawal para fasilitator agar dapat menjadi motor penggerak peningkatan literasi hukum masyarakat," ungkap Nuryanti.

Dirinya juga menambahkan bahwa Kanwil sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum memiliki peran penting dalam menyinergikan pemahaman hukum antara pusat dan daerah, sekaligus mendorong pendekatan yang inklusif dan humanis dalam penyebaran informasi hukum.

Bangun Citra Positif, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Pembinaan Kehumasan Kementerian Hukum



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pembinaan Kehumasan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Senin (22/04).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalsel, Rustam Sakka, bersama Tim Kerja Kehumasan melalui platform Zoom. Pembinaan ini mengangkat tema “Bangun Citra Kementerian Hukum Melalui Pengelolaan Media Sosial yang Efektif”.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Kemenkum RI, Ronald Lumbuun. Dalam sambutannya, Ronald menyampaikan bahwa Humas Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi, meningkatkan literasi publik, memantau dan merespon opini masyarakat, menciptakan reputasi positif, membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan, serta mengawal agenda reformasi birokrasi.

“Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya peningkatan pengetahuan praktisi kehumasan di lingkungan Kementerian Hukum, kegiatan ini bertujuan memperkuat pengelolaan media sosial sebagai wajah informasi resmi instansi pemerintah,” ungkap Ronald Lumbuun.

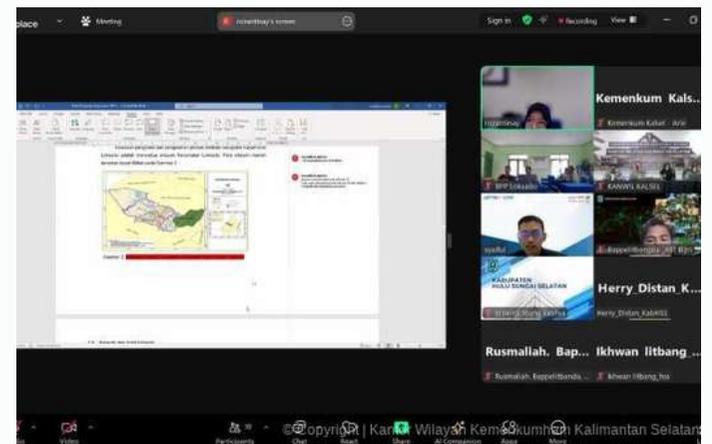
Sebagai bentuk penguatan kompetensi, pembinaan menghadirkan narasumber dari dua raksasa teknologi global, yakni Presthysa Lestari dari Google/Youtube dan Imanuel Lamo dari Meta/Facebook. Keduanya dijadwalkan mengisi sesi lanjutan pada tanggal 24 April 2025, membahas strategi komunikasi digital dan pemanfaatan media sosial dalam menunjang kerja kehumasan.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif, dialog, serta sesi tanya jawab yang mendorong peserta untuk memahami praktik terbaik dalam pengelolaan media sosial di era digital saat ini.

Secara terpisah Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka mewakili Kakanwil Kemenkum Kalsel Nuryanti Widyastuti menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memperkaya wawasan dan keterampilan praktis tim kehumasan, khususnya dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital. Kami berharap materi dari para narasumber dapat langsung diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan media sosial Kanwil,” ujarnya.

Kemenkum Kalsel Fasilitasi Penyusunan Indikasi Geografis Kayu Manis Loksado Bersama DJKI



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar pendampingan penyusunan dokumen deskripsi Indikasi Geografis (IG) untuk komoditas Kayu Manis Loksado pada Selasa (22/04/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom dan merupakan bagian dari upaya mendorong perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah.

Pendampingan ini melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai narasumber utama yang memberikan arahan dan telaahan langsung terhadap dokumen deskripsi IG yang tengah disusun. Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pihak terkait, di antaranya perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perwakilan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta perwakilan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kayu Manis Loksado.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual turut mendampingi jalannya kegiatan secara aktif. Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi, memimpin langsung jajaran dalam memberikan dukungan teknis dan koordinatif selama proses berlangsung.

Dalam sesi pendampingan, dokumen deskripsi IG Kayu Manis Loksado yang saat ini tengah dalam tahap penyusunan mendapat telaahan menyeluruh dari tim DJKI. Proses ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku sehingga permohonan IG dapat diajukan secara optimal.

Melalui pendampingan ini, diharapkan potensi lokal Kalimantan Selatan seperti Kayu Manis Loksado dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai produk indikasi geografis yang diakui secara nasional maupun internasional.

Semangat dan Integritas Warnai Seleksi PPPK Kemenkum Tahap II di Banjarbaru

Banjarbaru, Humas_Info – Suasana penuh semangat dan integritas menyelimuti pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tahap II dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (22/4) bertempat di Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.

Sebanyak 10 peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti sesi kedua seleksi tersebut. Mereka bergabung bersama peserta dari berbagai instansi vertikal lainnya seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Transmigrasi. Kehadiran seluruh peserta tanpa absen mencerminkan kesiapan dan antusiasme tinggi dalam menghadapi kompetisi nasional yang ketat.

Seluruh peserta dari Kemenkum merupakan bagian dari 10 orang yang akan bersaing memperebutkan kuota nasional sebanyak 133 formasi PPPK Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, hadir langsung memberikan motivasi kepada para peserta sebelum ujian berlangsung. Ia didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, serta Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

“Hari ini bukan sekadar mengikuti ujian, tetapi tentang membuktikan integritas dan kualitas diri. Saya harap seluruh peserta dari Kemenkum Kalsel mampu menjunjung tinggi kejujuran, fokus dalam menjawab soal, dan percaya pada kemampuan sendiri. Ini adalah bagian dari perjalanan menuju pengabdian yang mulia,” ujar Nuryanti.

Ia juga menekankan bahwa seleksi ini bukan hanya untuk mencari yang pintar, tapi juga mereka yang siap mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Kementerian Hukum membutuhkan insan-insan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter kuat. Jadikan seleksi ini pengalaman berharga dan tantangan yang harus ditaklukkan dengan semangat positif,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Eko Herdianto, menegaskan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib.

“Kami bersyukur kegiatan berlangsung tanpa kendala. Koordinasi antara panitia daerah dan pihak BKN berjalan baik. Semoga seluruh peserta mampu memberikan performa terbaik dan membawa nama baik wilayah,” ujar Eko.

Dengan selesainya pelaksanaan seleksi tahap II ini, seluruh peserta akan menanti hasil seleksi nasional. Harapannya, mereka dapat menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Hukum yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdikan kepada negara.



Sambut Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kanwil Kemenkum Kalsel Lakukan Koordinasi Bersama Disdagin Kota Banjarbaru

Banjarbaru, Humas_Info – Pada Selasa (22/04), telah dilaksanakan koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Banjarbaru terkait rencana peminjaman Mess L Banjarbaru yang secara resmi dikenal sebagai Dekranasda Creative Hub sebagai lokasi kegiatan Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Kegiatan koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, didampingi oleh sejumlah pelaksana. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Disdagin, Muriani bersama Kepala Bidang Perindustrian, Syaidah dan Kepala Seksi Industri Kreatif, Lina Mardiati.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Disdagin Kota Banjarbaru pada prinsipnya menyambut baik rencana pelaksanaan kegiatan yang akan digelar pada tanggal 26 April 2025 mendatang. Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut dan menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi tempat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satu syarat utama yang perlu dipenuhi yakni penyampaian surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru. Setelah surat diterima, Disdagin akan segera melakukan pengecekan ketersediaan dan kesiapan fasilitas Mess L.

“Melalui peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, kami ingin mendorong masyarakat, khususnya pelaku industri kreatif dan UMKM, agar lebih memahami hak kekayaan intelektual dan manfaatnya. Dengan begitu, karya-karya mereka dapat terlindungi secara hukum dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” ujar Riswandi selaku Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berbasis inovasi. “Kami berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah seperti Disdagin Kota Banjarbaru dapat terus ditingkatkan dalam mendukung ekosistem kekayaan intelektual yang berkelanjutan,” tutupnya. (foto : Kontributor KI, teks/ed : Pendi/Eko)



Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo



Jakarta - Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam produksi film 'Jumbo' tidak hanya terbatas pada jumlah, tetapi juga pada posisi kunci. Dua produser film ini, Anggia Kharisma dan Novia Puspa Sari, bukanlah nama baru dalam industri perfilman keluarga Indonesia. Sebelumnya, keduanya telah sukses memproduseri film-film populer seperti 'Keluarga Cemara', 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini', dan 'Nussa the Movie'.

Menurut Novia Puspa Sari, salah satu produser 'Jumbo', kontribusi perempuan sangat signifikan dalam mewujudkan film ini. Baginya, 'Jumbo' adalah mimpi yang terwujud berkat dedikasi dari banyak pihak, termasuk kontribusi luar biasa dari para perempuan.

"Dalam proses produksinya yang berlangsung lebih dari lima tahun, banyak talenta perempuan yang terlibat di berbagai lini, baik dari sisi kreatif maupun manajemen produksi. Peran dan kontribusi mereka adalah salah satu alasan mengapa 'Jumbo' bisa menjadi kisah yang hangat, penuh makna, dan begitu dekat di hati banyak penonton," ujar Novia pada 21 April 2025 di Jakarta.

Lebih lanjut, peran perempuan juga terlihat dalam perumusan ceritanya. Salah satunya Widya Arifianti, yang berperan dalam penulisan naskah 'Jumbo' bersama Ryan Adriandhy selaku sutradara film tersebut. Tidak hanya itu, salah satu pengisi lagu dalam film ini adalah aktris sekaligus penyanyi ternama Bunga Citra Lestari, yang turut andil sebagai pengisi suara Ibu Don, salah satu karakter penting dalam film 'Jumbo'.

Kontribusi signifikan perempuan dalam film 'Jumbo' mendapatkan apresiasi Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko. Agung mengatakan bahwa keterlibatan aktif perempuan dalam industri kreatif termasuk animasi, adalah hal yang sangat positif dan perlu terus didorong.

"Kontribusi perempuan dalam penciptaan karya membawa perspektif yang kaya dan beragam, yang pada akhirnya memperkaya kualitas karya yang dihasilkan. Film 'Jumbo' menjadi salah satu bukti nyata bagaimana talenta perempuan Indonesia mampu memberikan dampak yang besar," ucap Agung saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

Sebagai pesan penutup dalam rangka memperingati Hari Kartini, Novia Puspa Sari menyampaikan harapannya bagi para animator perempuan di Indonesia untuk terus bermimpi, tidak takut gagal, dan percaya pada proses.

"Dunia animasi butuh lebih banyak suara dan perspektif perempuan, jadi jangan ragu untuk bersinar dan terus berkarya," ujar Novi.

Terakhir, Agung juga berpesan untuk seluruh kreator Indonesia untuk selalu melindungi kekayaan intelektual yang telah diciptakan. Pelindungan hukum terhadap karya sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan industri perfilman.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi luar biasa perempuan Indonesia dalam produksi film animasi 'Jumbo'.

"Film 'Jumbo' membuktikan bahwa keberagaman perspektif, khususnya dari para kreator perempuan, mampu memperkaya nilai dan pesan dari sebuah karya. Ini adalah momentum yang sangat baik untuk terus mendorong partisipasi perempuan di sektor-sektor strategis, serta memperkuat pelindungan terhadap karya-karya mereka melalui kekayaan intelektual," ucapnya.

"Kami di Kemenkum Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung pelindungan dan pemberdayaan perempuan kreator melalui edukasi kekayaan intelektual dan kolaborasi lintas sektor. Semoga semakin banyak perempuan Indonesia yang berani berkarya, mencipta, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa," pungkas Kakanwil.

Perkuat Integritas Profesi Notaris, Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Kegiatan Pendampingan Pengisian PMPJ dan Pembinaan Notaris Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru



Tanah Bumbu, AHU_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Pendampingan Pengisian Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Pembinaan Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, Rabu (23/04) bertempat di Seroja Hall Ebony Hotel, Batulicin. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti.

Turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari.

Dalam sambutannya dalam kegiatan dengan 26 peserta orang peserta dari kalangan notaris di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru ataupun yang mewakili Kakanwil menegaskan bahwa penerapan PMPJ merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga marwah profesi notaris serta memperkuat sistem hukum nasional yang berintegritas.

“Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah langkah nyata dalam menjaga profesionalisme notaris. Ini bukan hanya untuk kepentingan para pihak yang terlibat, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap notaris itu sendiri,” ujar Nuryanti.

PMPJ merupakan prosedur yang wajib dilaksanakan oleh notaris dalam menjalin hubungan usaha dengan pengguna jasa, baik perorangan, korporasi, maupun bentuk perikatan lainnya. Tahapan dalam PMPJ meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan secara cermat dan berkesinambungan. Pentingnya pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) juga disampaikan, di mana semakin tinggi risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka semakin ketat pula prosedur yang harus diterapkan.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan pemahaman dan implementasi PMPJ secara optimal, tetapi juga menjadi momentum pembinaan terhadap para notaris agar senantiasa menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.

Kakanwil berharap, melalui kegiatan ini, akan terwujud peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, serta memperkuat kepastian dan keadilan hukum di wilayah Kalimantan Selatan.

“Laksanakan PMPJ dengan sebaik-baiknya, penuh integritas dan profesional, Ini adalah bagian dari langkah nyata kita dalam membangun pelayanan hukum yang lebih baik dan terpercaya,” pungkasnya.

Pentingnya PMPJ bagi Notaris dan Pengguna Jasanya : Menjaga Integritas dan Mencegah Risiko Hukum



Tanah Bumbu, AHU_Info – Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaporan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembinaan terhadap para notaris di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 23 April 2025, bertempat di Seroja Hall 1, Hotel Ebony Batulicin.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan para notaris memahami dan menjalankan kewajiban hukum mereka dalam menerapkan PMPJ. Berdasarkan data, dari total 26 notaris yang terdaftar di dua kabupaten tersebut, sebanyak 21 notaris telah melaporkan PMPJ pada tahun lalu. Namun, pengisian data yang dilakukan dinilai masih belum optimal. Selain itu, terdapat empat notaris baru yang perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan PMPJ sejak awal menjalankan tugasnya.

PMPJ sendiri merupakan prinsip yang mewajibkan notaris untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pengguna jasa mereka. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi notaris itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menggunakan jasanya. PMPJ juga menjadi garda depan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan jasa notaris dalam tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Dalam hal ini, notaris merupakan salah satu profesi yang rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam pemaparannya, narasumber Dianor, Penyuluh Hukum Muda Kanwil Kemenkum Kalsel menjelaskan bahwa terdapat dua formulir penting dalam proses PMPJ, yaitu Customer Due Diligence (CDD) dan Initial Due Diligence (IDD). Selain itu, notaris juga diwajibkan membuat laporan tahunan yang merinci pelaksanaan PMPJ.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, menekankan bahwa PMPJ harus dilakukan setiap kali notaris menerima pengguna jasa baru, ketika terdapat transaksi mencurigakan, atau bila terjadi perubahan signifikan terhadap identitas atau kegiatan pengguna jasa.

"Proses ini mencakup identifikasi, verifikasi, dan pencatatan informasi yang akurat, yang bertujuan untuk mendeteksi potensi risiko sejak awal", ungkap Meidy.



Penerapan PMPJ oleh notaris diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. Selain itu, kewajiban ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Kegagalan notaris dalam melaksanakan kewajiban PMPJ dapat berakibat serius, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin praktik. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan dan pendampingan seperti yang dilakukan di Tanah Bumbu ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman para notaris mengenai tanggung jawab hukum dan etik.

Dengan penerapan PMPJ yang konsisten dan menyeluruh, profesi notaris akan semakin terlindungi dari risiko hukum dan dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan sistem hukum yang bersih, transparan, dan terpercaya.

Penerapan PMPJ juga memberikan dampak langsung bagi pengguna jasa notaris. Dari sisi manfaat, pengguna jasa mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat karena data dan identitas mereka diverifikasi secara sah dan terdokumentasi. Hal ini juga menghindarkan mereka dari potensi terlibat dalam transaksi yang dianggap mencurigakan atau melanggar hukum.

Namun, pengguna jasa juga memiliki kewajiban untuk memberikan data dan dokumen identitas yang lengkap, benar, dan sah. Mereka wajib bersikap kooperatif dalam proses verifikasi dan tidak menyembunyikan informasi yang relevan. Jika pengguna jasa menolak atau tidak dapat diverifikasi, notaris berhak menolak pemberian jasa sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dengan penerapan PMPJ yang konsisten dan menyeluruh, profesi notaris akan semakin terlindungi dari risiko hukum dan dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan sistem hukum yang bersih, transparan, dan terpercaya. Demikian pula, pengguna jasa mendapat jaminan bahwa transaksi yang dilakukan berlangsung dalam koridor hukum dan tata kelola yang baik.



Tim KI Kemenkum Kalsel Tinjau Lokasi Kegiatan MIPC Sambut Hari Kekayaan Intelektual Sedunia



Banjarbaru, KI_Info – Dalam rangka menyambut peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 April 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melakukan peninjauan lokasi kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) pada Rabu, (23/04/2025).

Peninjauan yang dilaksanakan mulai pukul 13.00 WITA ini bertempat di Mess L Dekranasda Banjarbaru dan dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi dan sejumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), serta Jabatan Fungsional Umum (JFU) dari Kanwil Kalsel.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lokasi pelaksanaan MIPC, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Tim juga melakukan simulasi pengaturan tata letak ruang pertemuan serta mencatat berbagai kebutuhan pendukung guna kelancaran kegiatan yang akan datang.

Pihak pengurus harian Mess L turut menyampaikan kesediaan mereka dalam membantu memfasilitasi peminjaman tempat untuk kegiatan MIPC. Kerja sama ini diharapkan dapat menunjang suksesnya pelaksanaan MIPC sebagai salah satu upaya edukasi dan layanan publik di bidang kekayaan intelektual.

Dengan adanya kegiatan peninjauan ini, diharapkan pelaksanaan MIPC pada 26 April mendatang dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha dan kreator di wilayah Kalimantan Selatan.



Perkuat Kepastian Hukum, Dua Ranperda Kota Banjarmasin Diharmonisasi di Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar rapat harmonisasi bersama Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Kamis (24/4/25), bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dua Ranperda yang dibahas dalam rapat tersebut yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, didampingi para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan. Hadir dalam kegiatan ini unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dari lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, antara lain perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan amanat undang-undang yang sangat penting untuk memastikan agar produk hukum daerah yang dihasilkan tidak saling bertentangan dan memiliki kepastian hukum.

“Melalui harmonisasi, kami ingin memastikan setiap ketentuan dalam Ranperda telah selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, serta tidak tumpang tindih, sehingga dapat menjadi payung hukum yang kokoh dan aplikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelas Anton.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, menyampaikan bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan disusun guna menjamin terselenggaranya kegiatan perindustrian dan perdagangan yang sejalan dengan tujuan negara untuk memenuhi hak atas ekonomi masyarakat.

“Ranperda ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan umum, dengan pengelolaan sektor industri dan perdagangan yang komprehensif serta terpadu, sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujar Muftezar.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin, menjelaskan bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat disusun untuk menciptakan Kota Banjarmasin yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif.

“Peraturan ini bertujuan menumbuhkan disiplin dalam perilaku masyarakat, serta meningkatkan upaya penegakan ketertiban dan perlindungan masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan,” pungkas Muzaiyin.

Jalannya rapat berlangsung lancar dan kondusif dengan pembahasan mendetail terhadap pasal demi pasal dari kedua ranperda. Proses harmonisasi ini bertujuan menyempurnakan substansi serta memberikan masukan konstruktif demi terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas dan aplikatif.

Kemenkum Kalsel Ikuti Pendalaman Materi Penyusunan Regulasi Koperasi Merah Putih



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui jajaran Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti kegiatan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan secara daring, Kamis (24/4). Kegiatan ini mengangkat tema “Penyusunan Regulasi sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”.

Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis dan harmonisasi regulasi dalam rangka mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai amanat dari Instruksi Presiden terbaru.

Acara dibuka dengan pemaparan materi dari Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan III, Unan Pribadi dan keynote speech oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra.

Fokus yang Disampaikan pada kegiatan ini menitikberatkan pada urgensi regulasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa serta strategi sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah dalam mendukung pendirian koperasi berbasis desa dan kelurahan.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif serta tanya jawab yang dimanfaatkan oleh para peserta untuk menggali isu-isu aktual seputar perumusan regulasi dan tantangan implementasi di daerah.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya para Perancang Peraturan Perundang-undangan, dalam mendukung kebijakan strategis nasional demi kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi Simponi V2: Dukungan Transformasi Digital Pengelolaan Anggaran



Banjarmasin, Humas_Info — Dalam upaya memperkuat transformasi digital di bidang pengelolaan anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar kegiatan Sosialisasi Modul Perencanaan Aplikasi Simponi V2. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Microsoft Teams dan diikuti oleh jajaran Bagian Tata Usaha dan Umum.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (24/04) pagi ini diikuti oleh Kepala Bagian TU dan Umum, Bendahara, serta staf dari bagian yang sama. Bertempat di Ruang Rapat Bagian TU dan Umum Kanwil, sosialisasi berlangsung mulai pukul 10.00 WITA. Acara diawali dengan pembukaan oleh MC dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan oleh Direktur Sistem Penganggaran, Bapak Lisbon Sirait. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya digitalisasi sebagai solusi untuk menciptakan perencanaan anggaran yang lebih efisien, akuntabel, dan terintegrasi.

Sesi utama sosialisasi diisi oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dimas Abdillah, Pranata Komputer Ahli Muda, menyampaikan materi pengantar mengenai Overview Modul Perencanaan Simponi V2. Ia menjelaskan berbagai fitur baru dalam sistem ini, termasuk penyederhanaan alur kerja dan integrasi dengan proses penganggaran nasional. Selanjutnya, Mardiona—juga Pranata Komputer Ahli Muda dari Ditjen Anggaran—memberikan demonstrasi langsung penggunaan aplikasi. Dalam sesi ini, peserta diperlihatkan simulasi langkah demi langkah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran menggunakan sistem baru yang telah diperbarui tersebut.

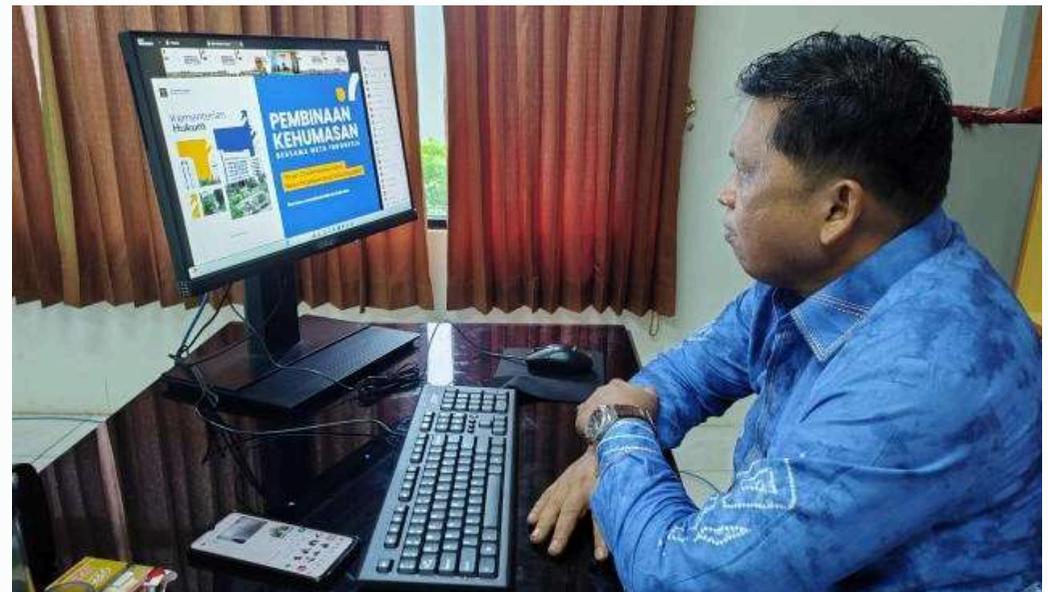
Simponi V2 dirancang untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan anggaran yang sering kali rumit dan terfragmentasi. Modul ini mendukung proses perencanaan berbasis elektronik dan selaras dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah digenjut pemerintah.

Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman teknis mengenai aplikasi, tetapi juga pemahaman strategis terhadap pentingnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran. Sosialisasi ini menjadi bentuk konkret komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam menyukseskan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola keuangan negara.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dari upaya adaptif terhadap inovasi sistem perencanaan nasional. “Kami menyadari bahwa pengelolaan anggaran yang efektif tidak bisa lepas dari dukungan teknologi informasi. Melalui sosialisasi ini, kami siap untuk menerapkan sistem yang lebih modern dan akuntabel,” ujarnya.

Kegiatan berjalan lancar dan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang berlangsung aktif. Para peserta menyambut baik hadirnya Simponi V2 dan menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan sistem ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sosialisasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berbasis data.

Hari Kedua Pembinaan Kehumasan Media Sosial: Kemenkum Kalsel Ikuti Pemaparan dari Narasumber Meta



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan kembali mengikuti lanjutan Zoom Meeting Pembinaan Kehumasan Media Sosial yang digelar oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI, Kamis (24/04). Kegiatan yang berlangsung dari ruang kerja masing-masing ini merupakan hari kedua dari rangkaian pembinaan dengan tema “Bangun Citra Kementerian Hukum Melalui Pengelolaan Media Sosial yang Efektif”.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalsel, Rustam Sakka, bersama Tim Kerja Kehumasan turut aktif dalam kegiatan ini yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas praktisi kehumasan Kemenkum dalam mengelola akun media sosial resmi instansi pemerintah.

Pembinaan kali ini menghadirkan narasumber dari Meta (Facebook-Instagram), Imanuel Lamo, yang secara komprehensif mengulas strategi penggunaan platform media sosial, pengamanannya serta cara mengatasi berbagai kendala teknis dan strategis yang kerap dihadapi para pengelola akun.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Kemenkum RI, Ronald Lumbuun, membuka kegiatan dengan sambutan yang menekankan pentingnya peran media sosial sebagai wajah institusi di ruang publik digital. Ronald menyampaikan bahwa Kementerian menargetkan capaian 10 juta pengikut lintas platform, serta terus mendorong evaluasi branding satuan kerja dan pengelolaan konten yang lebih terarah dan profesional.

Kegiatan juga dilengkapi dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab yang memungkinkan peserta mengeksplorasi berbagai praktik terbaik dan inovasi dalam pengelolaan media sosial di era digital yang dinamis. Secara keseluruhan, kegiatan hari kedua pembinaan kehumasan ini berjalan dengan baik dan lancar, serta diharapkan dapat memperkuat peran humas sebagai garda terdepan dalam membangun citra positif Kemenkum di mata publik.



Kassel Gelar Musrenbang 2025: Sinergi Pusat-Daerah Dorong SDM Unggul dan Penguatan Sektor Unggulan

Banjarmasin, Humas_Info - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional" ini berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Jl. Suprpto, Banjarmasin Tengah. Acara dibuka dengan semangat nasionalisme lewat menyanyikan lagu Indonesia Raya, disusul laporan dari Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menekankan pentingnya pembangunan berbasis SDM yang unggul serta penguatan sektor unggulan untuk mendukung posisi Kalsel sebagai pusat distribusi regional.

Gubernur menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi dan produktivitas masyarakat menjadi bagian penting dari agenda pembangunan provinsi. "Kami memerlukan strategi yang menasar sektor unggulan yang nyata, seperti pertanian, UMKM, dan industri kreatif, serta didukung oleh infrastruktur yang mumpuni," ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi banjarmasin.kalselprov.go.id. Musrenbang juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang mengapresiasi konsistensi Kalsel dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam paparannya, Bima Arya mengatakan, "Kalsel memiliki potensi strategis sebagai simpul konektivitas Kalimantan. Pemanfaatan posisi ini akan maksimal bila dibarengi dengan peningkatan daya saing SDM lokal," sebagaimana dilaporkan oleh infopublik.id (diakses 24 April 2025).

Sesi materi diisi oleh sejumlah narasumber dari kementerian, termasuk Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, yang menyoroti pentingnya integrasi layanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, Tri Dewi Virgiyanti dari BAPPENAS menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, terutama dalam penentuan indikator kinerja dan pagu indikatif program. Musrenbang ini menghasilkan kesepakatan berbagai prioritas strategis Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2026, antara lain: pembangunan SDM unggul dan berbudaya; pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian berbasis wilayah; penguatan sektor industri, UMKM, perdagangan, pertanian, dan pariwisata; peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas mitigasi bencana; serta penguatan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik.

Dalam kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut hadir sebagai bagian dari unsur instansi vertikal kementerian yang berkontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Eko Herdianto beserta jajaran menghadiri kegiatan secara langsung. Kehadiran perwakilan Kanwil Kemenkum Kalsel mencerminkan komitmen institusi dalam mendukung penguatan kualitas SDM aparatur dan penyelarasan kebijakan kepegawaian dengan arah pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan pelayanan publik yang prima dan berbasis regulasi yang kuat

Musrenbang dihadiri oleh seluruh kepala daerah dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, unsur Forkopimda, serta Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang adaptif dan progresif.



Lindungi Karya UMKM! IP Clinic Hadir di Banjarbaru



Banjarbaru, Humas _Info – Kabar baik datang bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarbaru. Dalam upaya mendorong perlindungan hukum terhadap hasil karya dan produk lokal, Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) akan menggelar kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) pada Sabtu, 26 April 2025, bertempat di Mess L Dekranasda Banjarbaru.

Kegiatan ini didukung hasil koordinasi yang telah dilakukan pada Rabu, 23 April 2025, antara pihak Kanwil Kemenkum Kalsel dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) Kota Banjarbaru. Dalam pertemuan tersebut, Diskopnaker menyambut antusias ajakan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan MIPC. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk menyebarkan informasi kegiatan kepada UMKM binaan mereka agar dapat memanfaatkan kesempatan langka ini.

Melalui kegiatan ini, masyarakat khususnya para pelaku UMKM akan mendapatkan berbagai layanan dan informasi seputar Kekayaan Intelektual secara langsung dan gratis. Salah satu layanan utama yang ditawarkan adalah konsultasi pendaftaran merek, sebuah langkah penting dalam melindungi identitas dan keberlangsungan usaha secara hukum. Selain itu, klinik ini juga membuka kesempatan bagi UMKM untuk memahami dan mengakses pendaftaran Desain Industri, terutama yang berkaitan dengan tampilan kemasan produk yang memiliki ciri khas.

Tak hanya berhenti sampai di situ, IP Clinic juga mendorong adanya pendaftaran Merek Kolektif, yang sangat relevan bagi komunitas-komunitas pengrajin lokal seperti Kampung Purun dan Kampung Pejabat di Banjarbaru. Dengan pendaftaran ini, produk-produk unggulan dari komunitas tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum kolektif dan memperkuat posisi mereka di pasar nasional maupun internasional.

Selain konsultasi dan edukasi, kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam dunia usaha. UMKM tidak hanya diberi pengetahuan, tetapi juga didorong untuk segera mengambil langkah nyata dalam mendaftarkan karya mereka agar tidak mudah ditiru atau disalahgunakan pihak lain.

Kegiatan ini terbuka untuk umum dan sangat direkomendasikan bagi para pelaku usaha lokal yang ingin mengembangkan bisnisnya secara lebih profesional dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memantau akun media sosial resmi Kanwil Kemenkum Kalsel atau langsung menghubungi Diskopnaker Banjarbaru. Lindungi karya dan produk Anda. Daftarkan sekarang melalui IP Clinic – satu hari, sejuta manfaat untuk masa depan UMKM yang lebih kuat!

Kemenkum Kalsel Lantik Dua Notaris Pengganti untuk Kotabaru dan Banjarmasin, Pastikan Pelayanan Kenotariatan Tetap Berjalan Optimal



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelangsungan pelayanan kenotariatan dengan melantik dua orang notaris pengganti, Kamis (24/4/2025).

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, di hadapan para saksi, rohaniwan, serta tamu undangan yang terdiri dari pejabat manajerial dan non-manajerial Kantor Wilayah, serta keluarga dari notaris pengganti.

Dua notaris pengganti yang dilantik adalah:

- Syarif Hidayat, S.M., S.H., M.Kn., sebagai notaris pengganti untuk menggantikan sementara Notaris Kabupaten Kotabaru, Akhmad Murdani, S.Pd., S.H., M.Kn., yang melaksanakan cuti selama 62 hari terhitung mulai tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan 5 Juli 2025;
- Rika Mega Mustika, S.H., sebagai notaris pengganti untuk menggantikan sementara Notaris Kota Banjarmasin, Mery Liana, S.H., M.Kn., yang melaksanakan cuti selama 20 hari terhitung mulai tanggal 28 April 2025 sampai dengan 17 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Meidy Firmansyah menekankan pentingnya kehadiran notaris pengganti sebagai bagian dari mekanisme hukum untuk menjamin kelangsungan pelayanan kenotariatan. "Pelantikan notaris pengganti bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kenotariatan yang baik," ujarnya.

Ia menjelaskan, Notaris Pengganti merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris yang mengambil cuti wajib mengajukan permohonan untuk penunjukan notaris pengganti karena selama masa cuti, notaris tidak diperkenankan melaksanakan praktik kenotariatan. Oleh karena itu, peran notaris pengganti menjadi krusial dalam menjamin pelayanan hukum tetap berjalan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Notaris pengganti memiliki hak, kewenangan, serta konsekuensi hukum yang sama dengan notaris definitif selama menjalankan tugasnya," lanjut Meidy.

Ia juga mengingatkan bahwa notaris pengganti dituntut untuk bekerja dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan dalam menerima dan memproses setiap permohonan dari masyarakat. "Prinsip perlindungan hukum bagi pengguna jasa dan menjaga integritas profesi notaris harus selalu menjadi pedoman. Setiap notaris, termasuk notaris pengganti, wajib mengisi dan melaporkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bagian dari akuntabilitas dan perlindungan hukum," tegasnya.

Dengan pelantikan ini, diharapkan pelayanan kenotariatan di wilayah Kabupaten Kotabaru dan Kota Banjarmasin tetap berjalan optimal selama notaris definitif menjalani masa cuti.

Perkuat Sinergi, Kemenkum Kalsel dan DPRD Tapin Bahas Pembaruan MoU Penyusunan Ranperda



Tapin, PPPH_Info — Dalam upaya memperkuat kerja sama kelembagaan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, Kamis (24/4), terkait pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, yang menyerahkan secara resmi draf MoU terbaru kepada pihak DPRD Kabupaten Tapin.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan audiensi Sekretariat DPRD Tapin pada 16 April lalu, yang mengusulkan pembaruan kerja sama mengingat nota kesepahaman sebelumnya telah berakhir masa berlakunya,” ujar Anton.

MoU ini menjadi dasar penting dalam memberikan dukungan strategis dan teknis kepada DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pembaruan kesepakatan, diharapkan sinergi antara DPRD Tapin dan Kemenkum Kalsel semakin erat dan produktif, khususnya dalam menghasilkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Pemkab Tapin Raih Nilai Sangat Baik dalam Penilaian IRH 2024, Kemenkum Targetkan Peningkatan di Tahun 2025



Tapin, PPHP_Info — Pemerintah Kabupaten Tapin menunjukkan komitmen kuat dalam reformasi hukum dengan raihan nilai 86.44 (kategori A/Sangat Baik) dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2024. Prestasi ini menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang langsung menindaklanjuti dengan kegiatan koordinasi pada Kamis (24/4) di Kantor Bupati Tapin.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan. Fokus utama pertemuan adalah persiapan Pemkab Tapin dalam menghadapi penilaian IRH tahun 2025, dengan harapan mampu melampaui capaian sebelumnya.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah langkah strategis, antara lain penunjukan person in charge (PIC) di lingkup Pemkab Tapin, serta pemahaman teknis terkait pengisian penilaian mandiri melalui Aplikasi IRH di laman <https://irh.kemenkum.go.id>. Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam reformasi hukum di daerah.

Anton Edward Wardhana menyampaikan apresiasinya atas pencapaian yang diraih oleh Pemkab Tapin. "Nilai 86.44 adalah capaian yang sangat baik, namun tentu masih ada ruang untuk perbaikan. Kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk semakin adaptif dan responsif terhadap upaya reformasi hukum, sehingga pada tahun 2025 kita bisa bersama-sama mencatatkan peningkatan yang signifikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pokja, Eldy Prasetya Setiawan, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkum merupakan kunci dalam menciptakan tata kelola hukum yang lebih baik dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Dengan nilai yang sudah sangat baik, kita optimis Kabupaten Tapin bisa mencetak prestasi lebih tinggi lagi," ungkapnya.



Kemenkum Kolaborasikan Layanan Hukum dengan Program JKN BPJS Kesehatan



Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalin kemitraan strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman. Kerja sama ini diharapkan dapat meluaskan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program jaminan kesehatan.

Nota kesepahaman tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program JKN ini nantinya akan menjadi pedoman, serta dasar kerja sama antara kedua lembaga dalam meningkatkan partisipasi pengguna layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual terhadap program JKN.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan ruang lingkup nota kesepahaman meliputi sosialisasi, publikasi, dan edukasi mengenai program JKN; pertukaran data dan informasi yang relevan; sinergi dalam pelaksanaan program-program strategis masing-masing pihak; serta kerja sama lainnya yang akan disepakati kemudian.

“Ruang lingkup ini tentu tidak sekadar soal pertukaran data, tapi juga kolaborasi program antara Kemenkum dan BPJS Kesehatan. Itu bisa kita lakukan. Saya mengapresiasi semua yang kita lakukan, tentu semata-mata demi kemaslahatan bangsa dan negara,” kata Supratman usai menandatangani nota kesepahaman bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, Kamis (24/04/2025) di kantor pusat BPJS Kesehatan.

Kemenkum, lanjut Supratman, sebagai kementerian yang bertanggungjawab di bidang hukum, berkepentingan untuk memberikan dukungan kepada seluruh kementerian/lembaga negara. Dukungan tersebut di antaranya terkait perubahan-perubahan regulasi untuk menguatkan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, termasuk BPJS.

“Kita akan memberi dukungan menyangkut kebutuhan BPJS Kesehatan, mungkin di kemudian hari akan ada perubahan-perubahan di bidang regulasi yang memperkuat posisi BPJS Kesehatan untuk terus bisa menjalankan fungsinya sesuai amanat dari BPJS Kesehatan ataupun juga Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” ujar Supratman.

“Terkait dengan kolaborasi program, tentu BPJS Kesehatan punya program-program yang bisa kita sinergikan, yang memberikan nilai edukasi, literasi kepada masyarakat tentang pentingnya gotong-royong untuk membangun bangsa ini supaya menjadi lebih sehat,” lanjutnya.

Melalui kerja sama ini, juga diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran peserta baru JKN, maupun kepatuhan dari peserta dan pemberi kerja, serta memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses yang layak terhadap perlindungan kesehatan. Sebagai informasi per 1 April 2025, jumlah peserta program JKN mencapai lebih dari 279,6 juta jiwa atau setara 98,13 persen dari total penduduk.

“Sekarang di Kemenkum kita punya layanan administrasi hukum umum, serta layanan kekayaan intelektual. Mungkin ada data yang bisa dihubungkan atau diintegrasikan antara Kemenkum dengan BPJS Kesehatan untuk melengkapi data kepesertaan yang kurang dua persen, dan sekaligus menjaga kepesertaan itu bisa tetap bertahan, jangan sampai berkurang. Tentu Kemenkum akan memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan di Kemenkum,” jelas Supratman.

Sementara itu Ghufroon berharap ke depan, kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan program JKN. Misalnya pemanfaatan data yang relevan dan akurat dari Kemenkum, BPJS Kesehatan akan dapat mengidentifikasi segmentasi masyarakat yang belum terjangkau oleh program ini.

“Artinya, hampir seluruh penduduk Indonesia telah terlindungi oleh jaminan kesehatan. Dengan kerja sama ke depannya kami harapkan kualitas dari cakupan kepesertaan semakin baik,” ucap Ghufroon.

Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi kedua instansi dalam meningkatkan partisipasi pemohon pelayanan administrasi hukum umum dan pelayanan kekayaan intelektual dalam program JKN. Adapun pelaksanaan nota kesepahaman yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang bersifat teknis.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menyambut baik terjalannya nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dengan BPJS Kesehatan sebagai bentuk sinergi strategis dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Bagi kami di wilayah, kerja sama ini akan menjadi dorongan nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperluas kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kami percaya bahwa dengan mengintegrasikan layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual dengan program JKN, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan akses terhadap dua hak penting sekaligus: perlindungan hukum dan perlindungan kesehatan. Kanwil Kemenkum Kalsel siap mendukung penuh implementasi kerja sama ini di tingkat daerah dan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam upaya kolektif membangun sistem pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan,” ungkapnya.



Kemenkum Kalsel Siap Dukung Satgas PASTI, Bersama OJK Bahas Strategi Berantas Keuangan Ilegal di Kalimantan Selatan



Banjarmasin, Humas _Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui keterlibatan aktif dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi Kalimantan Selatan.

Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Satgas PASTI yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan pada Jumat (25/4), bertempat di Borneo Ballroom, Kantor OJK Regional 9 Kalimantan. Hadir mewakili Kemenkum Kalsel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah.

Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Agus Maiyo, menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi kompleksitas kejahatan keuangan.

“Aktivitas keuangan ilegal kini menyasar berbagai lapisan masyarakat. Satgas PASTI hadir sebagai forum kolaboratif untuk mempercepat respons dan tindakan bersama,” ujarnya.

Rangkaian rapat juga diisi dengan pengarahan dari Analis Eksekutif Senior Sekretariat Satgas PASTI, Fajarudin, yang menyampaikan pentingnya pemanfaatan sistem pelaporan digital nasional Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Platform ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan penipuan keuangan secara daring, yang kemudian diteruskan ke lembaga berwenang untuk ditindaklanjuti.

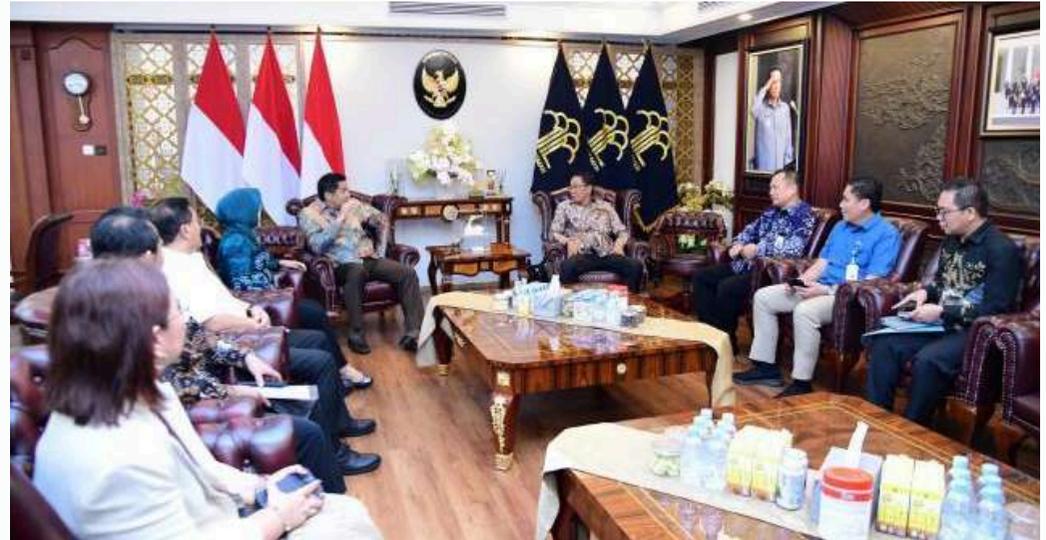
“IASC didesain untuk bekerja cepat, tepat, dan menimbulkan efek jera melalui pemblokiran, penghentian aktivitas ilegal, hingga rekomendasi penegakan hukum. Ini adalah bentuk nyata sinergi lintas sektor berbasis teknologi,” jelas Fajarudin dalam paparannya melalui Zoom Meeting.

Meidy Firmansyah, mewakili Kemenkum Kalsel, menyampaikan kesiapan institusinya dalam mendukung kerja Satgas.

“Kami siap terlibat aktif, khususnya dalam aspek literasi hukum, pengawasan badan hukum, dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi tindakan pencegahan maupun penegakan,” tuturnya.

Rapat ditutup dengan diskusi penyusunan rencana kerja Satgas PASTI Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2025, yang mencakup peningkatan literasi hukum dan keuangan, penguatan pengawasan entitas ilegal, serta pelibatan aparat penegak hukum dan komunitas digital dalam pencegahan kejahatan keuangan.

Kemenkum Tuntaskan Harmonisasi RPermen PKP, Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bisa Punya Rumah



Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah menuntaskan proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan Kemenkum menerima surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal PKP pada tanggal 16 April lalu. Kemudian tahap harmonisasi diselesaikan dalam waktu satu hari, dan peraturan tersebut telah berlaku mulai tanggal 22 April 2025. "Telah terbit surat selesai harmonisasi nomor: PPE.PP.01.05-1374 tanggal 17 April 2025 dan per 22 April kemarin sudah berlaku," ujar Supratman, Kamis (24/04/2025) di gedung Kemenkum Jakarta.

Lulusan doktor Universitas Muslim Indonesia ini menyebut tim kerja harmonisasi terdiri dari perwakilan Kemenkum, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik, BP Tapera, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Bank Tabungan Negara.

Dalam rapat tim kerja, terdapat tiga poin penting yang dibahas. Pertama, pencantuman "besaran penghasilan" ke dalam judul RPermen tersebut. Kemudian, pemisahan pengaturan mengenai besaran penghasilan MBR ke dalam bab tersendiri. Dan poin ketiga yaitu perubahan rincian mengenai zonasi wilayah dan besaran nilai penghasilan orang perseorangan. "Dari hasil harmonisasi maka terdapat tiga ruang lingkup di rancangan permen ini, yaitu besaran penghasilan MBR, kriteria MBR, persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR," katanya.

Menkum berharap terbitnya peraturan ini dapat mendukung terwujudnya program Presiden Prabowo untuk membangun tiga juta rumah. "Saya berharap dengan peraturan ini bisa membuat gairah pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana program Presiden Prabowo bisa lebih mudah diwujudkan," ujar Menteri yang akrab disapa Bang Maman ini.

Untuk diketahui, harmonisasi merupakan salah satu fungsi Kemenkum yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP). Harmonisasi menjadi salah satu tahapan yang wajib dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi dilakukan untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi juga dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Kepala Kantor Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti mengungkapkan bahwa, "Harmonisasi ini menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di Kalimantan Selatan, untuk semakin mudah mengakses kepemilikan rumah layak huni. Ini sejalan dengan semangat keadilan sosial dan penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat."

Kemenkum Kalsel Mantapkan Persiapan Peringatan Hari KI Sedunia dan Mobile IP Clinic 2025



Banjarbaru, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan persiapan untuk Peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia 2025 serta Mobile Intellectual Property (IP) Clinic Kalimantan Selatan yang akan berlangsung pada Sabtu 26 April 2025 di Mess L Banjarmasin.

Kegiatan persiapan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi bersama Panitia Pelaksana MIC Kalsel 2025, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

Dalam pelaksanaannya nanti, Mobile IP Clinic Kalimantan Selatan akan menghadirkan berbagai layanan, seperti konsultasi kekayaan intelektual, pendampingan pendaftaran KI, seminar edukatif, serta penyerahan sertifikat kekayaan intelektual. Adapun sertifikat yang akan diserahkan meliputi 38 merek personal, 2 merek kolektif, 2 sertifikat indikasi geografis (KIK), dan 2 sertifikat hak cipta.

Selain itu, akan digelar mini pameran produk UMKM sebagai bentuk apresiasi dan promosi karya lokal. Kegiatan ini juga akan dihadiri oleh enam perwakilan kepala daerah, yakni Wakil Walikota Banjarmasin, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Banjar, serta Kepala Bidang Perindustrian Kota Banjarbaru. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan KI semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan.



Hentakan Kekayaan Intelektual di Banua, Kemenkum Kalsel Ikuti Peringatan Hari KI Sedunia 2025



Banjarbaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia 2025 melalui kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) yang digelar di Mess L Banjarmasin, Sabtu (26/04/2025). Kegiatan ini tersambung secara nasional melalui Zoom bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum.

Hari KI tahun ini mengangkat tema nasional “Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital”. Dalam sambutan terpusat, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Hari KI adalah wujud komitmen dalam menjadikan kreativitas sebagai kekuatan ekonomi bangsa.

“Kreativitas anak bangsa adalah aset negara. Dengan perlindungan dan ekosistem yang kolaboratif, kita wujudkan ekonomi kreatif menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ekosistem KI di daerah.

“Ini wujud komitmen kita dalam mendorong perlindungan kekayaan intelektual sebagai pilar ekonomi kreatif dan daya saing daerah,” ujarnya.

Selain memperingati Hari KI, kegiatan juga menghadirkan Mobile IP Clinic (MIPC) yang menyediakan layanan konsultasi, pendampingan pendaftaran, seminar edukatif, dan pameran produk UMKM Kalimantan Selatan.

Direktur Jenderal KI, Razilu, menyebut MIPC serentak merupakan bentuk nyata pelayanan DJKI ke seluruh lapisan masyarakat. “Kami ingin memastikan layanan KI hadir hingga ke pelosok, mendukung kreator dan UMKM membangun Indonesia berdaya saing,” ujarnya.



Dukung Komersialisasi, Kemenkum Kalsel Hadirkan Expo Produk UMKM pada Mobile IP Clinic 2025



Banjarbaru, Humas_Info – Peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan tidak hanya menghadirkan edukasi dan layanan konsultasi, tetapi juga dimeriahkan dengan expo produk UMKM dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) yang digelar di Mess L Banjarmasin pada Sabtu (26/04/2025).

Expo produk UMKM ini menghadirkan ragam produk unggulan UMKM lokal, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, fesyen etnik, hingga produk herbal dan kecantikan yang seluruhnya merupakan karya kreatif anak bangsa. Sebagian besar peserta pameran merupakan pelaku UMKM yang telah mendaftarkan merek atau hak ciptanya melalui layanan DJKI, atau tengah dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk lokal yang telah mendapat perlindungan hukum melalui sertifikat kekayaan intelektual. Selain menjadi ajang promosi, pameran juga memberi inspirasi dan edukasi kepada peserta lain tentang pentingnya pengelolaan kekayaan intelektual dalam strategi pengembangan usaha.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menyatakan bahwa pameran ini merupakan bentuk nyata dari hilirisasi dan pemanfaatan kekayaan intelektual di tengah masyarakat. “Produk-produk yang ditampilkan hari ini membuktikan bahwa UMKM kita tidak hanya mampu berinovasi, tetapi juga mulai menyadari pentingnya perlindungan hukum atas karya mereka. Expo produk UMKM ini menjadi cermin bahwa ekonomi kreatif di daerah tumbuh bersama kesadaran hukum,” ujarnya.

Antusiasme pengunjung terlihat dari interaksi yang hangat antara pelaku UMKM dan peserta kegiatan. Expo produk UMKM ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang tidak hanya melengkapi peringatan Hari KI Sedunia, tetapi juga menjadi wahana penting untuk mendorong promosi, perlindungan, dan penguatan produk lokal berbasis kekayaan intelektual.



Dukung Pemajuan Kekayaan Intelektual di Banua, Kemenkum Kalsel Serahkan Piagam Apresiasi dan Sertifikat KI pada Hari KI Sedunia 2025



Banjarbaru, Humas_Info – Momentum peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2025 yang digelar pada 26 April 2025 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menjadi semakin berkesan dengan diselenggarakannya seremoni penyerahan sertifikat kekayaan intelektual dan piagam apresiasi.

Dalam kegiatan yang digelar di Mess L Banjarmasin ini, Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti secara simbolis menyerahkan sertifikat kekayaan intelektual, yang terdiri dari:

- 38 Sertifikat Merek UMKM,
- 2 Sertifikat Merek Kolektif,
- 1 Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal dari Pemkab Hulu Sungai Selatan,
- 1 Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal dari Pemkab Tapin, serta
- 6 Sertifikat Hak Cipta milik Pemerintah Kabupaten Tapin.

Penyerahan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan para pelaku usaha dalam mendaftarkan kekayaan intelektual mereka sebagai langkah awal menuju legalitas dan komersialisasi produk berbasis inovasi.

Selain itu, enam pemerintah daerah juga menerima Piagam Apresiasi, yaitu:

- Pemerintah Kota Banjarmasin,
- Pemerintah Kota Banjarbaru,
- Pemerintah Kabupaten Banjar,
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
- Pemerintah Kabupaten Tapin, dan
- Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Apresiasi ini diberikan atas dukungan aktif dan kolaboratif dari pemerintah daerah dalam membina, memfasilitasi, serta memajukan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah masing-masing.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menyatakan bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukan hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih besar melalui hilirisasi dan ekspansi pasar.

“Kami harapkan setelah ini para UMKM yang mereknya sudah terdaftar dapat berkontribusi dalam perkembangan komersialisasi serta hilirisasi Kekayaan Intelektual, khususnya di Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Penyerahan sertifikat dan piagam ini sekaligus menjadi wujud nyata bahwa kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam membangun ekonomi daerah yang berdaya saing tinggi, mandiri, dan berkelanjutan.

Layanan Langsung ke Masyarakat, Kemenkum Kalsel Berikan Edukasi dan Konsultasi KI melalui Mobile IP Clinic Kalsel 2025



Banjarbaru, Humas_Info – Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2025, Sabtu, (26/04/2025) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC). Kegiatan ini menjadi salah satu strategi penting dalam mendekatkan layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akademisi, dan pelaku industri kreatif.

MIPC menghadirkan berbagai layanan terpadu, mulai dari konsultasi langsung dengan para ahli kekayaan intelektual, pendampingan pendaftaran merek, hak cipta, dan KI komunal, hingga seminar edukatif bertema “Mendorong Hilirisasi dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual untuk Kemandirian Ekonomi Bangsa.” Seminar ini menghadirkan dua narasumber: Diannor dan Togi Leonardo, yang memberikan panduan praktis tentang bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkan KI untuk menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk.

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya UMKM yang memanfaatkan momen ini untuk berkonsultasi tentang perlindungan hukum atas produk dan karya mereka. Topik-topik seperti penggunaan merek, pentingnya pendaftaran hak cipta, serta potensi kekayaan intelektual komunal dalam konteks lokal turut menjadi sorotan.

Selain seminar dan layanan konsultasi, MIPC juga dimeriahkan oleh Expo produk UMKM Kalimantan Selatan yang menampilkan berbagai produk unggulan berbasis kreativitas dan inovasi lokal. Kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus ajang inspirasi bagi para pelaku usaha untuk mulai mengurus legalitas kekayaan intelektual atas produk mereka.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti berharap bahwa kehadiran MIPC mampu memberikan akses yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat untuk memahami pentingnya perlindungan KI dalam mendukung kemandirian dan kemajuan ekonomi bangsa.

“Kami berharap para pelaku usaha, UMKM, pelaku seni dan budaya, serta seluruh insan kreatif dapat memperoleh manfaat nyata melalui kegiatan ini,” ujarnya.





**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

bangga
melayani
bangsa



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](#)



[@kemenkumkalsel](#)



[kalsel.kemenkum.go.id](#)